

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Objek Penelitian

Dalam bab empat ini penulis akan memaparkan hasil dari penelitian dan pembahasan yang berdasarkan dengan judul skripsi yaitu Peran Pengurus Wanita Persatuan Pembangunan dalam Pelembagaan Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Jepara tahun 2017-2020 pemaparan pertama yaitu gambaran umum objek penelitian, data penelitian, dan hasil analisis objek penelitian

1. Gambaran Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Jepara

a. Sejarah Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Jepara

Tulisan ini akan menggambarkan objek dari penelitian yang di lakukan oleh penulis dalam penggambaran sejarah Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Jepara dan juga visi dan misi Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Jepara serta struktur organisasi dan penggambaran Wanita Persatuan Pembangunan Kabupaten Jepara sehingga bisa menggambarkan objek penelitian di Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Jepara tahun 2017-2020.

Partai Persatuan Pembangunan adalah salah satu partai politik di Indonesia lahir tanggal 5 Januari 1973 hasil dari empat partai Islam yaitu:

- a. Partai Nahdhatul Ulama,
- b. Partai Muslimin Indonesia,
- c. Partai Syarikat Islam Indonesia,
- d. Partai Islam Perti

Dengan 5 (lima) tokoh yaitu:

- a. KH Idham Chalid,
- b. H.Mohammad Syafaat Mintaredja,
- c. Haji Anwar Tjokroaminoto,
- d. Haji Rusli Halil.
- e. Haji Mayskur

Daftar nama di atas adalah pimpinan empat partai Islam, dari gabungan partai Islam, maka Partai Persatuan Pembangunan atau sebagai Rumah

Besar Umat Islam yang merupakan pergerakan-pergerakan politik islam dalam pembangunan demokrasi yang anggota-anggotanya tidak hanya islam tapi dari beberapa kalangan dalam mewujudkan islam merupakan agama yang Rahmatan Lil'alamiin.

Pada awal berdirinya, tanggal 5 Januari 1973 Partai Persatuan Pembangunan adalah asas islam dengan lambing Kakbah, tapi saat tahun 1984 Partai Persatuan Pembangunan berasaskan Pancasila sesuai dengan peraturan UU (perundang-undangan) dan system politik, hal tersebut bias terjadi karena adanya tekanan politik Orde Baru, sehingga Partai Persatuan Pembangunan secara resmi menggunakan asas Pancasila dengan lambing bintang segi lima berdasarkan Mukhtamar I Partai Persatuan Pembangunan tahun 1984. dalam perjalannya, Partai Persatuan Pembangunan kembali menggunakan asas Islam dengan lambang Kakbah sejak Orde baru lengsernya Presiden Soeharto tahun 1998 berdasarkan kesepakatan dalam Mukhtamar IV akhir tahun 1998. Partai Persatuan Pembangunan berkomitmen untuk terus menjaga keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila, meskipun partai menggunakan asas Islam.

Partai Persatuan Pembangunan pemilihan ketua umum pertama adalah H.Mohammad Syafaat Mintaredja, SH pada tanggal 5 Januari 1973 sampai tahun 1978 selanjutny ketua umum ke dua Partai Persatuan Pembangunan yaitu: H. JailaniNaro, SH, H. ketua umum ketiga yaitu: Ismail Hasan Metareum, SH, H. ketua umum keempat yaitu: Hamzah Haz dan ketua umum ke lima yaitu: H. Suryadharma Ali yang terpilih melalui Mukhtamar VI yang diadakan pada tahun 2007.

2. **Visi dan Misi Partai Persatuan Pembangunan**

Visi partai "Terwujudnya masyarakat yang bertaqwa kepada Allah SWT dan Negara Indonesia yang adil, makmur, sejahtera, bermoral, demokratis, tegaknya supremasi hukum, penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), serta menjunjung tinggi

harkat-martabat kemanusiaan dan keadilan sosial yang berlandaskan kepada nilai-nilai ke-Islaman".

Misi Partai Persatuan Pembangunan meliputi:

- a. PPP berkhidmat untuk berjuang mewujudkan dan membina manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, meningkatkan mutu kehidupan beragama, mengembangkan ukhuwah Islamiyah (persaudaraan sesama muslim).
- b. PPP berkhidmat untuk memperjuangkan hak-hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sesuai harkat dan martabatnya dengan memperhatikan nilai-nilai agama terutama ajaran Islam, dengan mengembangkan ukhuwah insaniyah (persaudaraan sesama manusia).
- c. PPP berkhidmat untuk berjuang memelihara rasa aman mempertahankan, memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dengan mengembangkan ukhuwah wathaniyah (persaudaraan sebangsa).
- d. PPP berkhidmat untuk berjuang melaksanakan dan mengembangkan kehidupan politik yang mencerminkan demokrasi dan kedaulatan rakyat dengan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- e. PPP berkhidmat untuk memperjuangkan berbagai upaya dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang diridhai Allah.¹

Partai Persatuan Pembangunan mempunyai kebijakan yang di bagi dalam beberapa bidang yakni agama, politik, ekonomi, hukum, sosial, pengetahuan dan keterampilan dan pendidikan dalam bidang agama, Partai Persatuan Pembangunan mengedepankan peran agama sebagai panduan moral dan sumber inspirasi dalam kehidupan negara dengan hubungan yang bersifat simbiotik, sinergis serta saling membutuhkan dan memelihara. Hal ini di wujudkan dengan sikap

¹Efilusmianingsih, Peranan Partai Persatuan Pembangunan (Ppp) Dalam Melaksanakan Pendidikan Politik Ntuk Meningkatkan Partisipasi Aktif Kaum Muda Di Kecamatan Kembangkabupaten Jepara, (Progampolitik Dan Kewarganegaraan) Semarang, Fakultas Ilmu Sosialuniversitas Negeri Semarang, 2013, Hal 85-87

saling toleransi antara umat beragama. Dalam bidang politik, Partai Persatuan Pembangunan terfokus dalam aspek penguatan ke-lembagaan, mekanisme dan budaya politik yang ber-demokratis dan ber-akhlaqul karimah demi meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM), serta menghargai kebebasan berekspresi, berpendapat dan berorganisasi. Selanjutnya dalam bidang ekonomi, Partai Persatuan Pembangunan lebih menekankan pada konsep ekonomi kerakyatan menegakkan supremasi hukum akan selalu di junjung tinggi oleh Partai Persatuan Pembangunan dengan ikut serta dalam upaya pemberantasan KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) penguatan institusi dan instrument penegak hukum serta selalu ikut aktif dalam pembaharuan hukum nasional.

Dalam sektor sosial, Partai Persatuan Pembangunan selalu berkomitmen untuk terus mewujudkan kehidupan sosial yang religius dan bermoral dengan menghilangkan budaya kekerasan dan mengembangkan nilai-nilai sosial budaya, kemudian dalam bidang pengetahuan dan keterampilan, Partai Persatuan Pembangunan ikut membantu demi terbentuknya manusia yang berkualitas dan menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama dalam pembangunan kesejahteraan, dalam Pemilu 2009 lalu, PPP berhasil mendapatkan total 37 kursi di DPR dengan persentase suara sebanyak 5,3%.

3. Ideologi Partai Persatuan Pembangunan

Islam adalah agama terakhir yang bertujuan untuk menyempurnakan ajaran agama sebelum Nabi Muhammad, Partai Persatuan Pembangunan memandang ajaran-ajaran keislaman merupakan ajaran Ahlussunnah waljama'ah yang bersumber oleh Nabi Muhammad .

Di dalam Partai Persatuan Pembangunan terdapat ajaran sariat Nabi Muhammad di dalamnya yang merupakan ideologi Islam Ahlussunnah Wal Jama'ah dari

perilaku dan tindakan Nabi Muhammad, Partai Persatuan Pembangunan merupakan salah satu tanda-tanda atau cirri husus dari partai islam yang mensimbolkan kebesaran dan kesucian ajaran-ajaran islam.²

**SUSUNAN KEPENGURUSAN PAC PPP PERIODE
2020-2025:**

- Ketua Umum** : Suharso Monoarfa
- Wakil Ketua Umum** : Zainut Tauhid, Arsul Sani, Ermalena, Amir Uskara, Musyaffa Noer.
- Sekretaris Jenderal** : Arwani Thomafi,
- Wakil Sekjen** : Idy Muzayyad, Qonita Luthfiah Syukron Makmun
- Bendahara Umum** : Surya Batara Kartika
- Ketua Bidang Fungsional** : Achmad Baidowi, Jafaruddin Harahap, Rendhika Deniardy Harsono, M. Qoyum Abdul Jabar, Saifullah Tamliha, Nyoman Anjani.
- Ketua Bidang Isu Strategis** : Habib Hasan Mulachela, Warti'ah, Illiza Sa'aduddin Jamal, Joko Purwanto, Rina Fitri, Syamsurizal Atik Heru Maryati, Emma Umiyyatul Chusnah, Gus Rojih Maimoen, Andi Surya, Anggi A Paturusi, Irene Rusli Khalil.
- Ketua Bidang Pemenangan Dapil** : Dony Ahmad Munir, Putri Gayu, Dewi Arimbi, Sarah Larasati, Habib Farhan Al Amri, Syarifah Amelia, Hilman Ismail Metareum, Yunus Razak, Ainul Yaqin, Hakim Muzadi, Nadia Hasna Humaira, Hendra Kusumah Chairunnisa, Audy Joenaidi, Yudhistira Raditya Soesatyo, Adika Lubis.

**4. Wanita Persatuan Pembangunan (WPP)
Kabupaten Jepara**

Wanita Persatuan Pembangunan berdiri di jepara tahun 1998 di dirikan oleh Ibu Ismiyati Maskuri (DPC)

²Desi Ratna Sari, Strategi Dewan Pimpinan Cabang (Dpc) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Dalam Meraih Suara Pada Pemilihan Legislatif Di Kota Padangsidempuan, (JURUSAN HUKUM TATA NEGARA) PADANGSIDIMPUAN, FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM, tahun 2018, hal 51-53

PPP Jepara Wanita Persatuan Pembangunan adalah salah satu sayap dari Partai Persatuan Pembangunan yang di dalamnya terdapat para perempuan-perempuan dalam membangun dan mempersatukan umat islam terutama dari pihak perempuan yang berasaskan islam bertujuan untuk pemberdayaan martabat perempuan dengan memfasilitasi kegiatan para wanita dalam perjuangan melalui partai politik dengan melakukan konsolidasi dengan para wanita melalui berbagai kegiatan, peran-peran perempuan dalam meningkatkan kualitas perempuan yaitu melalui kegiatan pengajian rutin selapanan bantuan sosial di momen-momen tertentu, dan donor darah.

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Data tentang peran Pengurus Wanita Persatuan Pembangunan dalam pelebagaan Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Jepara tahun 2017-2020.

Peran Pengurus Wanita Persatuan Pembangunan di Partai Pesatuan Pembangunan Kabupaten Jepara merupakan suatu peranan yang di lakukan oleh para wanita dalam membangun dan menyatukan Partai Persatuan Pembangunan.

Dari wawancara peneliti dengan Ibu Hj malichah (ketua Wanita Persatuan Pembangunan Kabupaten Jepara) dan Ibu hasnah dan ibu Uzlifatul Faudiyah (anggota Wanita Persatuan Pembangunan) Wanita Persatuan Pembangunan berdiri di jepara tahun 1998 di dirikan oleh Ibu Hj Asmiyati Maskuri (DPC) Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Jepara dengan visi-misi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD ART PPP)

Progam Pengurus Wanita Persatuan Pembangunan Kabupaten Jepara merupakan pemberdayaan wanita di tingkat kecamatan-kecamatan bahkan sampai di tingkat desa, proses pelebagaan Pengurus Wanita Persatuan Pembangunan DPC PPP melihat kaum wanita yang cenderung ikut kiprah di dunia politik akhirnya DPC PPP berinisiatif untuk membentuk kelembagaan wanita dalam partai Persatuan Pembangunan yang di istilahkan sayap

partai bagi wanita akhirnya berdirilah organisasi Wanita Persatuan Pembangunan yang kelembagaannya di bawah lindungan partai.

Peran Pengurus Wanita Persatuan Pembangunan Kabupaten Jepara untuk memfasilitasi keinginan para wanita dalam perjuangan bernegara dan berbangsa melalui partai politik dengan melakukan konsolidasi dengan para wanita melalui berbagai kegiatan yaitu:

- a. Kegiatan pengajian rutin selapanan
- b. Kegiatan sosial di momen-momen tertentu
- c. Kegiatan santunan yatim piyatu

Biaya yang digunakan dalam melaksanakan dan mensukseskan Peranan Pengurus Wanita Persatuan Pembangunan Kabupaten Jepara dengan biaya swadaya dari masyarakat dan bantuan dari partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Jepara, tidak semua Pengurus Wanita Persatuan Pembangunan bisa menjalankan peranan masing-masing karena politikus di bagi menjadi dua politikus aktif yang selalu melakukan peranan secara aktif, dan politikus pasif poitikus yang tidak bisa menjalankan peranannya.

Peran Pengurus Wanita Persatuan Pembangunan Kabupaten Jepara bisa mendapatkan kedudukan tinggi di partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Jepara karena antusias para wanita dalam menjalankan peranannya menjadikan semangat perjuangan sehingga tidak tertutup kemungkinan para wanita mendapatkan kedudukan tertinggi di Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Jepara dan mendapatkan aspirasi dan menjadi penyebab besarnya Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Jepara.³

2. Data tentang hambatan Pengurus Wanita Persatuan Pembangunan dalam pelebagaan Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Jepara tahun 2017-2020.

Menurut wawancara kepada Ibu Uzlifatul Faudiyah (anggota Wanita Persatuan Pembangunan) mengenai

³ Ibu Hj Malichah, Ketua Wanita Persatuan Pembangunan Kabupaten Jepara, Ibu Uzlifatul Faudiyah, Ibu Hasnah anggota Wanita Persatuan Pembangunan wawancara oleh penulis, 8 September 2021.

hambatan Pengurus Wanita Persatuan Pembangunan dalam pelebagaan Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Jepara tahun 2017-2020 yaitu:

- a. Masalah sistem politik: dalam peran perempuan masih lemah kendala ini seakan-akan laki-laki mendominasi jalannya politik di indonesia sehingga membuat kurangnya peran politik perempuan di indonesia.
- b. Masalah budaya patriarki: masalah ini masih menganggap bahwa budaya dari pihak laki-laki masih memegang kekuasaan politik.
- c. Masalah psikologi: ini lebih mengarah pada psikolok dari pihak perempuan ketakutan perempuan dalam memperoleh kuasa dalam politik.⁴

Menurut wawancara peneliti dengan Ibu Hasnah (Pengurus Wanita Persatuan Pembangunan kabupaten jepara) mengenai hambatan Wanita Persatuan Pembangunan dalam pelebagaan Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Jepara yaitu:

- a. Izin dari suami: izin dari suami mungkin sekilas menjadi alasan setiap anggota WPP tapi itu tidak bisa di mungkiri tidak hanya satu anggota, saya melihat masalah izin dari suami menjadi masalah yang serius.
- b. Biaya yang selalu di dapat melalui iuran setiap anggota : menurut Ibu hasnah setiap kegiatan terdapat iuran yang di isi seiklasnya, hasinya untuk kegiatan-kegiatan anggota, tidak sedikit anggota yang keberatan dengan alasan ekonomi sehingga ada yang keluar dari WPP atau tidak aktif lagi di organisasi WPP.⁵

3. Data tentang peran dan progam Anggota DPRD perempuan Kabupaten Jepara.

Menurut wawancara kepada ibu Uzlifatul Faudiyah dan Ibu hasnah (anggota DPRD Perempuan Kabupaten Jepara) Program dari Anggota DPRD perempuan di kabupaten Jepara Banyak program yang sudah

⁴Ibu UzlifatulFaudiyah, anggota Wanita Persatuan Pembangunan, wawancara oleh penulis 8 September 2021

⁵Ibu Hasnah, anggota Wanita Persatuan Pembangunan kabupatenjepara, wawancara oleh penulis, 22 September 2021

dijalankan maupun masih direncanakan oleh Anggota DPRD perempuan di Kabupaten Jepara yaitu:

- a. Memberi semangat emansipasi Wanita di perkumpulan-perkumpulan perempuan di Jepara. Setiap DPR Perempuan di Jepara pasti ikut menaungi, atau menjadi pengurus dari perkumpulan-perkumpulan Perempuan di daerahnya masing-masing, seperti saya yang menjadi Pengurus jam'iyah pengajian di desa saya. Ada juga beberapa teman juga menaungi ibu-ibu PKK, dll.
- b. Berencana memperbaharui aturan tentang kursi perempuan yang hanya dapat porsi 30% agar bisa naik lagi persentasenya hingga bisa sejajar.
- c. Penyerapan aspirasi tidak hanya pada reses, namun pada perkumpulan-perkumpulan yang di ikuti.
- d. Mengadakan audiensi atau diskusi, dengar pendapat kekampus-kampus terdekat untuk membahas aperda atau mungkin kebijakan tentang perempuan di panggung pemerintahan.
- e. Mengusulkan adanya acara-acara keagamaan seperti peringatan Nuzulul Qur'an, Isro'ami'roj di kalangan DPRD dan jajaran pemerintah kabupaten dan boleh dihadiri oleh masyarakat umum.

Jumlah DPRD perempuan kabupaten Jepara sebelumnya kita ada 7 perempuan di DPRD Kabupaten Jepara, namun 1 rekan kita telah wafat. Sekarang tinggal 6 perempuan.

Peran dari DPRD perempuan kabupaten Jepara ada beberapa peran DPRD perempuan yaitu:

- a. Peran sebagai ibu. Menjadi sosok keibu-ibuan di tengah-tengah anggota yang lain yang Sebagian besar adalah laki-laki.
- b. Sosok yang *rumat*.
- c. Perbandingan yang patut di pertimbangkan.
- d. Pemerjuang hak-hak perempuan.

Semua Anggota DPRD perempuan bisa menjalankan perannya Alhamdulillah selama ini saya rasa sudah menjalankan peran dengan semaksimal yang kami bisa menjadi keibu-ibuan, menjadi sosok yang

rumat dan pembanding sa'at rapat, selain itu saat tugas menyerap aspirasi misalnya, kami tidak mau kalah dengan laki-laki kami dengarkan aspirasi-aspirasi dari warga dapa kami sebisa dan sebanyak mungkin, dan juga menanggapinya dengan sesuai porsinya.

Selain itu kami selalu berusaha hadir dalam rapat untuk bisa benar-benar mendengar dan menganalisis kebijakan yang akan turun atau yang akan di perbaharui. Terlebih pada kebijakan tentang keterlibatan perempuan dalam panggung pemerintahan.

Bentuk Peran Anggota DPRD Perempuan di Kabupaten Jepara yaitu:

- a. Sebagai sosok ibu kita melunakkan ego laki-laki yang keras dengan kelembutan yang kita miliki kita juga bisa menjadi pemarah untuk mereka yang kadang kekanak-kanakan dalam bekerja dan juga taklelah untuk mengingatkan satusama lain jika ada yang kelewatan dalam pengambilan keputusan.
- b. *Rumat*; barang-barang atau inventaris di gedung DPRD sudah menjadi kebiasaan bagi kami untuk mengingatkan agar barang selalu terawat dan rapi hal ini juga kita lakukan guna memberi contoh pada masyarakat, bahwa kita di fasilitasi gedung dan segala inventaris itu harus kita jaga karena semua itu milik negara yang kita cintai.
- c. Dalam rapat perundang-undangan, kita akan bicara paling keras jika ada kebijakan yang merugikan masyarakat apalagi perempuan. Mungkin karena emosi perempuan sangat kental, jadi kita sangat bersikekeh jika ada kejadian semacam itu.

Proses Peran Anggota DPRD perempuan di kabupaten Jepara sekarang masih di angka 30% kursi untuk perempuan. Saya masih memiliki keinginan seperti Swedia yang 45% jajaran legislatifnya adalah perempuan sudah banyak perempuan di Indonesia yang membanggakan di kancah perpolitikan, dan juga karena negara kita menganut demokrasi, maka memperjuangkan hak perempuan menurut saya sangat di perlukan. Setiap peran DPRD perempuan berjalan dengan baik 80% peran di jalankan dengan baik

sebagian yang lain adalah karena kadang emosi kita over, jadi bisa menjadikan perjalanan kita terseok-seok misalnya, adu argument hingga sakit hati kadang yang seperti itu menjadikan perempuan kehilangan keobjektifannya.

Biaya untuk mensukseskan peranan DPRD perempuan, alhamdulillah kita pakai dana dari kantong kami sendiri gaji dan tunjangan yang kami terima insyaAllah cukup untuk menjalankan program-program yang sudah di rencanakan dari adanya DPRD perempuan membuat para perempuan memperoleh peranan yang baik seharusnya begitu dan bisa memperoleh peranan yang lebih baik lagi Seperti yang saya katakana tadi kita masih Sebagian kecil, namun dengan adanya kita (perempuan di legislatif) akan memperjuangkan hak-hak perempuan semaksimal yang bisa saya lakukan.

Perempuan menjadi Ibu, menjadi istri menjadikan hambatan dari Peran Anggota DPRD perempuan menurut saya hal tersebut tidak terlalu menjadi hambatan karena pikiran kita sudah terbiasa dibagi-bagi. Sebelum jadi anggota DPRD pun perempuan harus bisa mengatur kebutuhan yang bermacam-macam, menjadi ibu rumah tangga plus menjadi pengurus organisasi. dan memang kita harus punya keselarasan pikiran dengan suami untuk hal semacam itu.

Hambatan-hambatan dari peran perempuan di DPRD Kabupaten Jepara hambatan nya adalah jumlah kita masih sangat sedikit menurut saya makanya saya bilang ingin jumlah perempuan di legislative Jepara bertambah nantinya.

Peran Anggota DPRD perempuan sama dengan DPRD laki-laki dalam hal anggaran dan pengawasan kewenangan mengontrol pelaksanaan perda saya kita sama peran antara perempuan dan laki-laki. Bedanya

adalah dalam hal legislasi, yang mana dalam pembentukan perda, kita selalu minoritas.⁶

C. Analisis Data Penelitian

Pada bagian ini peneliti akan memaparkan hasil analisis data penelitian yang telah di dapat sebelumnya, data yang di peroleh saat wawancara, observasi, dan dokumentasi di Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Jepara pada Pengurus Wanita Persatuan Pembangunan Kabupaten Jepara dan kepada Anggota DPRD perempuan Kabupaten Jepara penelitian ini berdasarkan teori-teori pelebagaan partai politik dan teori peran dan konsep perempuan dalam politik yaitu:

1. Analisis Peran Pengurus Wanita Persatuan Pembangunan dalam Pelebagaan partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Jepara.

Pelebagaan Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Jepara, Menurut Huntington pada negara berkembang Kekokohan partai politik sangat tergantung pada kemandirian partai politik sehingga dapat melembaga dengan baik dan kokoh terdapat beberapa dimensi yaitu:

- a. Adanya dimensi penyesuaian diri dan kekakuan.
 - keluwesan dan kekakuan partai politik sangat mempengaruhi tingkat pelebagaan dan jika partai politik tidak begitu luwes juga sangat mempengaruhi tingkat pelebagaannya terhadap tinggi rendahnya tingkat pelebagaannya, terdapat cara-cara dalam adaptasi partai politik salah satunya dilihat dari segi umur yang di golongkan menjadi tiga cara pertama di lihat dari perhitungan kronologis artinya semakin lama umur dari partai politik semakin tinggi tingkat pelebagaannya

Partai Persatuan Pembangunan berdiri tanggal 5 Januari 1973 Partai Persatuan Pembangunan adalah asas islam dengan lambang Kakkah, tapi saat tahun 1984 Partai Persatuan

⁶ Ibu Hasnah,Ibu UzlifatulFauadiyah, DPRD Perempuan kabupatenjepara, wawancara oleh penulis, 22 September 2021

Pembangunan berasaskan Pancasila sesuai dengan peraturan UU (undang-undangan) dan sistem politik, hal tersebut bisa terjadi karena adanya tekanan politik Orde Baru, sehingga Partai Persatuan Pembangunan secara resmi menggunakan asas Pancasila dengan lambang bintang segi lima berdasarkan Muktamar I Partai Persatuan Pembangunan tahun 1984 dalam perjalannya, Partai Persatuan Pembangunan Kembali menggunakan asas Islam dengan lambang Kabah sejak Orde baru lengsernya Presiden Soeharto tahun 1998 berdasarkan kesepakatan dalam Muktamar IV akhirtahun 1998.

Kedua di lihat dari segi umur generasi partai politik masih mengikuti tokoh-tokoh atau cikal bakal dan masih menganut cara dalam pemecahan masalah dan aturan-aturan dari cikal bakal maka pelembagannya masih rendah dan jika partai politik berdiri sendiri untuk beradaptasi dan mempunyai tokoh-tokoh baru sehingga bisa merumuskan masalah maka semakin tinggi tingkat pelembagannya.

Dalam Partai Persatuan Pembagunan kepemimpinan itu memang sangat di butuhkan, tapi tidak sekedar pemimpin tapi pemimpin yang bisa mempengaruhi anggota-anggotanya dan para masyarakat untuk bisa mematuhi peraturan-peraturan yang sudah berlaku seperti di dalam Partai Persatuan Pembangunan sudah terdapat pergantian pemimpin sampai dengan 5 (lima) tokoh dan dengan menyatukan empat partai politik namun nilai pelembagaannya tetap terjaga karena setiap pemimpin partai memiliki karismatik dan kemampuan untuk memimpin.

- 1) KH Idham Chalid.
- 2) H .Mohammad Syafaat Mintaredja.
- 3) Haji Anwar Tjokroaminoto.
- 4) Haji Rusli Halil.
- 5) Haji Mayskur.
- 6) Partai Nahdhatul Ulama.

- 7) Partai Muslimin Indonesia.
- 8) .Partai Syarikat Islam Indonesia.
- 9) Partai Islam Perti.

Ketiga yaitu segi fungsi partai politik yang mampu berkembang dan beradaptasi dalam lingkungan luar dengan perubahan-perubahan dan mampu merubah peraturan-peraturan lingkungan yang ini mempunyai tingkat pelebagan yang tinggi di banding partai politik yang tidak mampu beradaptasi dalam lingkungan luar terhadap peraturan-peraturan yang berbeda maka tingkat pelebagaannya semakin rendah ukuran pelebagaan bisa di lihat di partai politik dengan sejauh mana partai politik bisa beradaptasi dalam perubahan fungsi.

Di dalam partai Persatuan Pembangunan untuk mengatur anggota-anggota partai sangatlah penting untuk menjalankan partai dalam memajukan partai, karena itu di dalam partai semua sistem harus trasparan dan harus ada kepercayaan masing-masing anggota sehingga bisa Kerjasama dengan baik dan terarah dalam menyelesaikan permasalahan di dalam Partai Persatuan Pembangunan sehingga permasalahan di dalam partai bisa di selesaikan secara interen dengan cepat dan baik sehingga partai bisa mandiri dalam pelebagaan.

Hasil dari wawancara peneliti kepada DPRD dan Wanita Persatuan Pembangunan, pelebagaan merupakan kemampuan orang-orang partai dalam mengelola partai politik baik pada saat pengambilan keputusan maupun dalam pemecahan masalah dan juga pengalaman menjadi sesuatu yang penting dalam menjalankan partai politik.

Hasil dari observasi di Wanita Persatuan Pembagunan antusias para Pengurus Wanita Persatuan Pembangunan dalam menjalankan peranannya yaitu pengajian selapanan dan antusias

dalam kegiatan sosial saat momen-momen tertentu dalam memperkuat pelebagaan.

b. Dimensi kompleksitas dan kesederhanaan

Suatu partai politik juga di lihat dari dimensi kompleksitas suatu partai dimensi komlek menjadi salah satu yang penting dalam tingkat pelebagaan.

Di dalam Partai Persatuan Pembangunan permasalahan sering kali terjadi sesama anggota partai sehingga cara dalam mengatasi masalah sangatlah penting untuk menyelesaikan masalah untuk tidak membuat perpecahan partai politik sehingga butuh sebuah persatuan dari lapisan atas sampai lapisan bawah.

c. Dimensi otonomi-subordinasi

Dimensi ini belajar tidak adanya pengaruh dari luar atas berbagai masalah dalam mencari pintu keluar yang di harapkan bisa merumuskan suatu permasalahan partai sehingga tidak perlunya pendapat dari partai politik lain dari dimensi otonomi di harapkan partai bisa menjadi motifasi percaya diri dalam melakukan yang terbaik tanpa surungan dari pihak lain

di dalam Partai Persatuan Pembangunan permasalahan di musyawarahkan sesama anggota partai baik senior yang membantu memecahkan masalah maupun junior sehingga bisa melahirkan keputusan yang tidak merugikan kedua pihak.

d. Dimensi kesatuan dan perpecahan

Di dalam partai politik sangatlah penting untuk mempersatuan anggota-anggota dalam pekerjaan, kekompakan dan lain-lain sehingga terbangun pelebagaan yang tinggi dan jika dalam partai politik tidak adanya kekompakan atau kesatuan dalam pekerjaan maka akan lahirnya perpecahan didalam partai dan juga rendahnya pelebagan partai.

Di dalam Partai Persatuan Pembangunan kekompakan sangat di nomer satukan karena Partai Persatuan Pembangunan belajar dari para

sesebuah yang menyatukan empat partai menjadi satu partai dengan tetap melembaga.

merupakan kemandirian struktural atau tingkah laku dan kultural sikap atau budaya, pelembagaan partai politik ini terdapat dua unsur yaitu unsur internal-eksternal dan unsur struktural-kultural hasil persilangan dari internal dan struktural, derajat identitas nilai hasil persilangan antara internal dan kultural, derajat otonomi partai hasil persilangan dari eksternal dan struktural dalam pengambilan keputusan serta derajat pengetahuan publik hasil persilangan dari eksternal dan kultural.

1) Derajat kesisteman

Ramlan Surbakti mengartikan bahwa drajat kesisteman menjadi sesuatu fungsi dalam partai politik sesuai dengan aturan-aturannya dan sesuai dengan persyaratan yang sudah di rumuskan dalam anggaran dasar (AD) dan anggaran rumah tangga (ART) dalam partai politik dan apabila fungsi-fungsi tersebut di laksanakan sesuai aturan dan sesuai dengan persyaratan sesuai yang dirumuskan dalam anggaran dasar (AD) dan sesuai dengan anggaran rumah tangga (ART) maka partai politik terlah di katakana sudah melembaga dalam derajat keislaman.

Seperti dalam Visi dan misi partai, Visi yaitu "Terwujudnya masyarakat yang bertaqwa kepada Allah SWT dan Negara Indonesia yang adil, makmur, sejahtera, bermoral, demokratis, tegaknya supremasi hukum, penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), serta menjunjung tinggi harkat-martabat kemanusiaan dan keadilan sosial yang berlandaskan kepada nilai-nilai ke-Islaman".

Misi Partai Persatuan Pembangunan meliputi:

- a) PPP berkhidmat untuk berjuang mewujudkan dan membina manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, meningkatkan

- mutu kehidupan beragama, mengembangkan ukhuwah Islamiyah (persaudaraan sesama muslim).
- b) PPP berkhidmat untuk memperjuangkan hak-hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sesuai harkat dan martabatnya dengan memperhatikan nilai-nilai agama terutama ajaran Islam, dengan mengembangkan ukhuwah insaniyah (persaudaraan sesama manusia).
 - c) PPP berkhidmat untuk berjuang memelihara rasa aman mempertahankan, memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dengan mengembangkan ukhuwah wathaniyah (persaudaraan sebangsa).
 - d) PPP berkhidmat untuk berjuang melaksanakan dan mengembangkan kehidupan politik yang mencerminkan demokrasi dan kedaulatan rakyat dengan prinsip musyawarah untuk mufakat.
 - e) PPP berkhidmat untuk memperjuangkan berbagai upaya dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang diridhai Allah.⁷

Partai Persatuan Pembangunan mempunyai kebijakan yang di bagi dalam beberapa bidang yakni agama, politik, ekonomi, hukum, sosial, pengetahuan dan keterampilan dan pendidikan dalam bidang agama, Partai Persatuan Pembangunan mengedepankan peran agama sebagai panduan moral dan sumber inspirasi dalam kehidupan negara dengan hubungan yang bersifat

⁷EfiLUsmia ningsih, PERANAN PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)DALAM MELAKSANAKAN PENDIDIKAN POLITIKUNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI AKTIF KAUM MUDA DI KECAMATAN KEMBANGKABUPATEN JEPARA, (progamPOLITIK DAN KEWARGANEGARAAN) SEMARANG, FAKULTAS ILMU SOSIALUNIVERSITAS NEGERI SEMARANG, 2013, hal 85-87

simbiotik, sinergis serta saling membutuhkan dan memelihara. Hal ini di wujudkan dengan sikap saling toleransi antara umat beragama. Dalam bidang politik, Partai Persatuan Pembangunan terfokus dalam aspek penguatan ke-lembagaan, mekanisme dan budaya politik yang ber-demokratis dan ber-akhlaqul karimah demi meningkatkan kualitas demokrasi di indonesia. Hal ini di tunjukkan dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM), serta menghargai kebebasan berekspresi, berpendapat dan berorganisasi. Selanjutnya dalam bidang ekonomi, Partai Persatuan Pembangunan lebih menekankan pada konsep ekonomi kerakyatan. Menegakkan supremasi hokum akan selalu di junjung tinggi oleh Partai Persatuan Pembangunan dengan ikut serta dalam upaya pemberantasan KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) penguatan institusi dan instrument penegak hokum serta selalu ikut aktif dalam pembaharuan hokum nasional.

Dalam sektor sosial, Partai Persatuan Pembangunan selalu berkomitmen untuk terus mewujudkan kehidupan sosial yang religius dan bermoral dengan menghilangkan budaya kekerasan dan mengembangkan nilai-nilai social budaya. Kemudian dalam bidang pengetahuan dan keterampilan, Partai Persatuan Pembangunan ikut membantu demi terbentuknya manusia yang berkualitas dan menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama dalam pembangunan kesejahteraan. Dalam Pemilu 2009 lalu, PPP berhasil mendapatkan total 37 kursi di DPR dengan persentase suara sebanyak 5,3%.

2) Derajat identitas nilai

Derajat identitas nilai adalah hubungannya dengan orientasi kebijakan atau Tindakan dari partai politik berdasarkan idiologi partai tidak hanya di posisi arah kebijakan tapi lebih mengarah pada posisi social pendukungnya, partai politik mempunyai sayap-sayap partai dalam membantu

mewujudkan visi-misi dari partai politik untuk mempermudah perkembangan partai politik dan jika partai politik tidak gotong-royong dengan sayap partai politik sulit dalam mengembangkan partai politik dengan kekuatan internal partai politik.

Partai politik biasa di katakana sudah melembaga dalam derajat identitas nilai jika partai politik mampu mengandeng organisasi-organisasi dari masyarakat contohnya: membuat sekumpulan pemuda masyarakat dalam membangun partai politik, membuat sekumpulan Wanita dalam membangun partai politik bahkan membuat sekumpulan dari orang-orang yang berpengaruh di masyarakat sehingga biasa cepat dalam membangun partai politiknya dengan dari lapisan masyarakat tersebut adalah sukarela tidak karena adanya nilai material.

Dalam Partai Persatuan Pembangunan terdapat beberapa sayap dari lapisan masyarakat yaitu sayap Angkatan muda Kakbah dan Gerakan Pemuda Kakbah yang di dalamnya terdapat para anak mudah, dan terdapat sayap Wanita Persatuan Pembangunan yang di dalamnya terdapat para Wanita lapisan masyarakat yang mampu membuat Partai Persatuan Pembangunan di Jepara menjadi partai besar dengan kata lain Partai Persatuan Pembangunan melembaga dengan baik.

3) Derajat otonomi partai dalam pengambilan keputusan

Derajat otonomi partai dalam pengambilan keputusan mengarah pada ketergantungan partai politik pada aktor eksternal, aktor dari luar menjadikan pelebagaan partai menjadi terganggu dan secara otomatis pelebagaan partai melemah actor dari luar menjadi pengaggu dari jalannya rodak kepartaian di dalam partai melalui derajat otonomi partai dalam pengambilan keputusan aktor dari luar bisa berbentuk siapa saja yang biasa mempengaruhi pengambilan keputusan

partai politik yang bisa menjadikan pelembagaan partai menjadi terganggu dan melemah.

Di Partai Persatuan Pembangunan dalam pengambilan keputusan dengan cara bermusawarah dengan para kiyai PPP dan para senior dan junior untuk merumuskan berbagai masalah dalam partai tabayun menjadi cara alternatif Partai Persatuan Pembangunan untuk memecahkan masalah dalam memutuskan keputusan sehingga adanya terasparansi pemikiran sehingga tidak adanya salah paham yang bisa memecah belah partai.

Partai politik bisa dikatakan sudah melembaga jika derajat otonomi partai dalam pengambilan keputusan tidak adanya pihak dari luar dalam mempengaruhi pengambilan keputusan pihak dalam partai mampu merumuskan keputusan-keputusan yang sekiranya bisa dijalankan oleh partai itu tanpa adanya pihak luar yang ikut campur di dalamnya.

4) Derajat pengetahuan publik.

Derajat pengetahuan public merupakan sejauh mana masyarakat dan partai politik saling berhubungan erat sehingga menimbulkan pengetahuan public terhadap masyarakat yang sulit untuk di hilangkan, lebih mengarah pada tindakan partai politik kepada masyarakat bukan tindakan masyarakat terhadap partai politik bisa dirumuskan semakin lama partai politik di masyarakat dengan tindakan-tindakan yang baik atau tidak baik maka masyarakat akan mengetahui pengetahuan positif maupun negatif terhadap partai politik.

Di dalam Partai Persatuan Pembangunan dengan para Sayap Partai Politik selalu berdekatan di dalam Masyarakat dengan meninggalkan pesan positif sehingga Partai Persatuan Pembangunan di Masyarakat di kenal dengan partai yang baik, seperti dalam sayap partai selalu mengadakan kunjungan di daerah yang terkena musibah, selalu

melakukan kegiatan-kegiatan di momen momen tertentu dan kegiatan rutinan selapanan pengajian sehingga di dalam masyarakat terdengar dengan partai yang baik.

Partai politik bisa di katakana telah melembaga Ketika apabila partai politik mampu menanam derajat pengetahuan publik kepada masyarakat dengan pengetahuan yang baik dan bisa menjadikan contoh kehidupan partai politik di masyarakat secara umum.

Menurut Yves Meny dan Andrew Knapp dalam Asshidiqie terhadap ciri-ciri pelembagan partai politik yaitu pertama usia partai politik di dalam partai politik untuk bisa berkembang harus melalui seleksi alam yang perlu waktu yang lama jika partai politik mampu melalui seleksi alam dengan waktu yang lama maka partai politik mampu berdiri sendiri dengan kemampuan yang telah di dapatkan dalam proses seleksi sehingga menghasilkan pemikiran-pemikiran baru dalam partai sehingga selalu melembaga. Kedua di personalisasi setiap organisasi harus memiliki orang-orang yang bisa membedakan urusan pribadi dan urusan organisasi sehingga tidak campur aduk urusan pekerjaan dengan urusan pribadi sehingga keduanya bisa berjalan dengan baik ketiga di frensiasi kemampuan organisasi politik dalam mengandeng organisasi dari luar untuk ikut bergabung dan saling mendukung sehingga organisasi tersebut melembaga.

Sepertihalnya berdirinya Partai Persatuan Pembangunan berdiri tanggal 5 Januari 1973 Partai Persatuan Pembangunan adalah asas islam dengan lambang Kakbah, tapi saat tahun 1984 Partai Persatuan Pembangunan berasaskan Pancasila sesuai dengan peraturan UU (undang-undangan) dan sistem politik, hal tersebut bisa terjadi karena adanya tekanan politik Orde Baru, sehingga Partai Persatuan Pembangunan secara resmi menggunakan asas Pancasila dengan

lambang bintang segi lima berdasarkan Mukktamar I Partai Persatuan Pembangunan tahun 1984. Dalam perjalannya, Partai Persatuan Pembangunan Kembali menggunakan asas Islam dengan lambang Kakbah sejak Orde baru lengsernya Presiden Soeharto tahun 1998 berdasarkan kesepakatan dalam Mukktamar IV akhir tahun 1998. Partai Persatuan Pembangunan berkomitmen untuk terus menjaga keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila, meskipun partai menggunakan asas Islam.

Dengan berbagai rintangan Partai Persatuan Pembangunan dalam membangun Pelembagaan Partai Persatuan Pembangunan dari awal lahirnya PPP sudah adanya kejolak yang mampu mengganti lambang partai sampai asas partai yang semula berasaskan islam dengan lambang kakbah menjadi berasaskan Pancasila dengan berlambang bintang segi lima kemampuan para pendiri Partai Persatuan Pembangunan yang mampu menghadapi permasalahan-permasalahan dalam partai politik untuk tetap mempertahankan pelembagaan partai politik.

Di dalam Partai Persatuan Pembagunan terdapat organisasi-organisasi masyarakat yang berhasil menjadikan itu sebagai bagian dari Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Jepara seperti Organisasi Angkatan Muda Kakbah (AMK) Organisasi Gerakan Pemuda Kakbah (GPK) dan Organisasi Wanita Persatuan Pembagunan (WPP) organisasi-organisasi tersebut dari masyarakat yang mampuh di gandeng oleh Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Jepara untuk membantu dan mendukung Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Jepara.

Pandangan keislaman tentang pelembagaan partai politik yang telah di jelaskan dalam Al-Quran dan hadis dalam Surat Al Baqarah ayat30 :

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي
 الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ
 فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ
 وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا
 تَعْلَمُونَ

Artinya: Mereka berkata: "Mengapa Allah akan menciptakan pemimpin di bumi yaitu seorang pemimpin yang akan merusak bumi dan saling membunuh, padahal kami selalu menyembah dan selalu menyebut nama mu?" Allah berfirman: "Sesungguhnya saya lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui"⁸

Keterkaitan Surat Al-Baqorah ayat 30 dengan judul Skripsi ini yaitu Peran Pengurus Wanita Persatuan Pembangunan dalam Pelembagaan Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Jepara, dulu pertama kali Allah menciptakan jin di bumi merusak bumi dari itu malaikat melarang Allah menciptakan manusia di bumi yang akan menjadi perusak bumi, Allah berfirman kamu tidak mengetahui apa yang aku (Allah) ketahui.

⁸ Umar Sidiq, kepemimpinan dalam islam: kajian tematik dalam Al-Quran dan Al-Hadis, dialogia, vol. 12 no. 1 juni 2014 hal 128.

Justru baik laki-laki maupun perempuan akan berperan menjadi kholifah pemimpin di bumi dan memakmurkan bumi.

Surat At-Taubatayat 71

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ
بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ
الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ
الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ
سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “baik pemimpin laki-laki maupun pemimpin perempuan yang beriman adalah mengajak kebaikan dan melarang kejelekan, melaksanakan dalam jalan Allah akan diberi rahmat oleh Allah..”⁹

Keterkaitan Surat At-Taubat dengan judul Skripsi yaitu Peran Pengurus Wanita Persatuan Pembangunan dalam Pelembagaan Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Jepara, peran pemimpin yaitu peran mengajak kebaikan dalam mendapatkan rahmad Allah baik pemimpin laki-laki maupun pemimpin perempuan.

⁹Yuminah Rohmatullah, kepemimpinan perempuan dalam islam: melacak sejarah feminisme melalui pendekatan hadis dan hubungannya dengan hukum Negara, jurnal syariah, jurnal ilmu hukum dan pemikiran, Volum 17, Nomor 1 juni 2017, hal 110

Surat At-Naml Ayat 23

إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ

شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ

Artinya: Adanya utusan Nabi Sulaiman melihat pemimpin perempuan yang mempunyai kerajaan yang besar dan mewah.¹⁰

Keterkaitan surat At-Naml Ayat 23 dengan judul Skripsi yaitu Peran Pengurus Wanita Persatuan Pembangunan dalam Pelembagaan Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Jepara di dalam kekuasaan Nabi Sulaiman terdapat Peran Wanita yang berperan menjadi Ratu memiliki kerajaan yang besar.

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَهْتَمٍ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ

الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ

بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَيَّامَ الْجَمَلِ ، بَعْدَ مَا كِدْتُ أَنْ

الْحَقَّ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ فَأُقَاتِلَ مَعَهُمْ قَالَ لَمَّا

بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ

¹⁰Syafieh, Potret Karakteristik Kepemimpinan Perempuan (Analisis Semiotika Surat Al-Naml: 23-44), Jurnal At-Tibyan, Volume 3 No. 1, Juni 2018, 46.

أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَكُوا عَلَيْهِمْ بِنْتُ كِسْرَى قَالَ
 «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ»¹¹

Artinya: Yaitu: perang saudara umat islam yang terbagi menjadi dua Kepemimpinan Aisyah dan kepemimpinan oleh Ali bin abi Talib umat. (HR. Bukhari)

Hubungan hadis ini HR. Bukhori dengan skripsi yang di tulis peneliti yaitu Peran Pengurus Wanita Persatuan Pembangunan dalam pelebagaan Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Jepara, didalam zaman Nabi Muhammad terdapat perpecahan Umat Islam yang terbagi menjadi 2 kelompok yaitu kepemimpinan Ali bin Abi Tolib dan Kepemimpinan Aisyah Istri Nabi Muhammad dalam perang onta.

Dari pembahasan di atas tidak adanya larangan perempuan menjadi pemimpin yaitu Aisyah memimpin peperangan melawan Ali bin Abi Tolib dalam perang onta.

حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن
 النبي صلى الله عليه وسلم قال : "ألا كُتِلُكُمْ
 رَاعٍ،

¹¹

<https://islam.nu.or.id/post/read/126575/kepemimpinan-perempuan-dalam-kajian-hadits>.

وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya: Masing- masing Kamu adalah pemimpin dan bertanggung jawab apa yang di pimpin.¹²

Keterkaitan Riwayat Muslim di atas keterkaitan dengan judul Skripsi yaitu Peran Pengurus Wanita Persatuan Pembangunan dalam Pelembagaan Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Jepara, semua orang berhak menjadi pemimpin termasuk wanita dengan imbuhan memiliki kecakapan dalam memimpin karena setiap pemimpin akan menerima tuntutan apa yang dia pimpin.

2. Peran Pengurus Wanita Persatuan Pembangunan dalam Pelembagaan Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Jepara.

Peran merupakan suatu yang melekat di diri seseorang berdasarkan kedudukan di suatu tempat atau pekerjaan peran merupakan penyajian informasi-informasi dari berbagai pengalaman sosial di masyarakat sehingga orang atau kelompok masyarakat ataupun tokoh masyarakat berperan sesuai adat dalam masyarakat yang sesuai dengan norma-norma yang telah di buat oleh tokoh masyarakat yang telah di tetapkan dan di setujui oleh segenap masyarakat.

Menurut Soekanto peran di bagi menjadi tiga 3

a. Peran Aktif

Peran aktif merupakan peran yang di dapat karena jabatan yang telah menjadi tanggung jawab seseorang yang memaku jabatan seperti Peran Pengurus Wanita Persatuan Pembangunan

¹² Novita Pancaningrum, KONTEKSTUAL KONSEP PEMIMPIN DALAM TEKS HADIS, Riwayat: Jurnal Studi Hadis issn 2460-755X eissn 2476-9649 Tersedia online di: journal.stainkudus.ac.id/index.php/Riwayat DOI: -, Volume 4 Nomor 2 2018, hal 217.

Kabupaten Jepara untuk memfasilitasi keinginan para Wanita dalam perjuangan bernegara dan berbangsa melalui partai politik dengan melakukan konsolidasi dengan para Wanita melalui berbagai kegiatan yaitu:

- 1) Kegiatan pengajian rutin selapanan
- 2) Kegiatan sosial di momen-momen tertentu
- 3) Kegiatan santunan yatim piyatu

Sebagai sayap dari Partai Persatuan Pembangunan Pengurus Wanita Persatuan Pembangunan harus berperan aktif dalam masyarakat dalam mengenalkan Partai Persatuan Pembangunan didalam masyarakat sangatlah penting dengan berbagai kegiatan-kegiatan yang bisa menjadikan masyarakat mengenal Partai Persatuan Pembangunan dengan pengenalan yang positif sehingga bisa mengakar didalam masyarakat.

b. Peran partisipasi

Peran partisipasi merupakan peran yang di dapat seseorang karena terlibat partisipasi dalam kegiatan dalam organisasi atau sosial masyarakat seperti halnya Peran Pengurus Wanita Persatuan Pembangunan dalam partisipasi kegiatan sosial yaitu: bantuan banjir, tanah longsor, donor darah dan lain-lain.

Peran Pengurus Wanita Persatuan Pembangunan dalam partai politik sangatlah penting dengan adanya peran Pengurus Wanita Persatuan Pembangunan yang konsisten yang dapat membedakan pekerjaan dan hal pribadi sehingga menjadikan semua peran berjalan dengan baik di dalam masyarakat.

c. Peran pasif

Peran yang di lakukan secara pasif yang bertujuan untuk lebih bisa memperlancar kegiatan organisasi atau kelompok.¹³ Seperti dalam Partai

¹³Syaron brigettle lantaeda Florence daicy J. lengkong jorie m ruru, peran badan perencanaan pembangunan daerah dalam penyusunan

Persatuan Pembangunan peranan para politisi senior untuk membimbing pemimpin dan para anggota Partai Persatuan Pembangunan untuk bisa menjalankan peraturan-peraturan partai untuk bisa melembaga.

Menurut wawancara peneliti kepada Penggurus Wanita Persatuan Pembangunan Kabupaten Jepara program dari WPP dalam pemberdayaan wanita di tingkat kecamatan-kecamatan bahkan sampai ketinggian desa.

Pengurus Wanita Persatuan Pembangunan berperan untuk memfasilitasi keinginan para Wanita dalam perjuangan bernegara dan berbangsa melalui partai politik dalam melakukan konsolidasi dengan para Wanita melalui berbagai kegiatan yaitu:

- 1) Pengajian rutin selapanan
- 2) Kegiatan sosial di momen-momen tertentu
- 3) Donor darah
- 4) Dan lain-lain

Sebagai sayap dari Partai Persatuan Pembangunan pengurus Wanita Persatuan Pembangunan walaupun selalu berhubungan dengan masyarakat dalam pengenalan Partai Persatuan Pembangunan tapi dalam pemecahan masalah Partai Persatuan Pembangunan tidak melibatkan pihak luar dalam pemecahan masalah selalu Bersatu anggota-anggota dalam bergabai permasalahan didalam organisasi.

3. Konsep Perempuan dalam Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Jepara

Perempuan dalam dunia politik adalah masalah yang menuntut untuk adanya kesetaraan hak antara kaum perempuan dan kaum laki-laki masalah perempuan menjadi aspek utama dalam relasi kelas golongan usia maupun identitas dan, perempuan hanya pada posisi pendamping laki-laki perempuan sering

RPJMD Kota Tomohon, jurnal administrasi publik, volum 04 No 048 hal 2.

kali tersingkir dari peran-peran laki-laki itu merupakan pengaruh yang besar terhadap perkembangan perempuan di dunia politik sehingga perempuan hanya bisa reproduksi dan tidak produktif.

Namun berbeda halnya penelitian yang dilakukan oleh peneliti di dalam Organisasi Wanita Persatuan Pembangunan Kabupaten Jepara perempuan selama ini sudah menjalankan peran dengan semaksimal menjadi keibu-ibuan, menjadi sosok yang rumat dan pembimbing saat rapat selain itu saat tugas menyerap aspirasi misalnya tidak mau kalah dengan laki-laki, dengarkan aspirasi-aspirasi dari warga dahil sebisa dan sebanyak mungkin, dan juga menanggapi dengan sesuai persinya. Selain itu selalu berusaha hadir dalam rapat untuk bisa benar-benar mendengar dan menganalisis kebijakan yang akan turun atau yang akan diperbaharui terlebih pada kebijakan tentang keterlibatan perempuan dalam tanggung pemerintahan.

Sosok ibu untuk melunakkan ego laki-laki yang keras dengan kelembutan yang kita miliki kita juga bisa menjadi pemaarah untuk mereka yang kadang kekanak-kanakan dalam bekerja dan juga taklelah untuk mengingatkan satu sama lain jika ada yang kelewatan dalam pengambilan keputusan.

Rumat; barang-barang atau inventaris di gedung DPRD sudah menjadi kebiasaan bagi kami untuk mengingatkan agar barang selalu terawat dan rapi hal ini juga kita lakukan guna memberi contoh pada masyarakat, bahwa kita di fasilitasi gedung dan segala inventaris itu harus di jaga karena semua itu milik negara.

Dalam rapat perundang-undangan, perempuan akan bicara paling keras jika ada kebijakan yang merugikan masyarakat apalagi perempuan mungkin karena emosi perempuan sangat kental, jadi sangat bersekukuh jika ada kejadian semacam itu.

Peran perempuan di dunia politik sangat menyedihkan dari tidak tercapainya jumlah perempuan di Partai Persatuan Pembangunan kurang dari 30%

untuk perempuan, kurangnya pengetahuan politik para perempuan dan yang selalu melihat budaya yang kalo tidak menyesuaikan budaya, bertentangan dengan sosial masyarakat.

Mungkin sudah ada 6 DPRD perempuan di jepara tapi jumlah itu jauh dari 30% kuota perempuan di dunia politik, pengetahuan politik sangat di butuhkan di samping uang semua orang bisa menyalonkan menjadi DPRD tapi kebanyakan dari orang tua sehingga anaknya amenjadi DPRD atau pun orang kaya yang menjadi DPRD karena uang, jarang sekali calon DPRD mempunyai pengetahuan yang memadai.

Tahun 1970 telah menunaikan istilah gender Ann Oakley pembedakan antara laki-laki dan perempuan gender adalah pembeda peranan laki-laki dan perempuan peranan perempuan dan laki-laki sangat berbeda antara factor domestic dengan factor publik sehingga dari gender tersebut bisa menciptakan keadilan sosial bisa tidak adanya kecemburuan di antara laki-laki dan perempuan.

Perubahan sosial di masyarakat membuat ketidak nyamanan dalam melakukan kegiatan sosial kemasyarakatan ketidak keseimbangan peran antara laki-laki dan perempuan baik di dalam sosial, agama maupun budaya, pekerjaan yang selalu mengutamakan laki-laki dalam bekerja sehingga perempuan mendapatkan ketidakadilan, ketidakadilan gender merupakan melanggar Hak Asasi Manusia yang menjamin atas hak-hak bekerja, hak hidup, hak publik, hak politik, hak atas peran yang sama dengan laki-laki dan lain-lain.

Seks di sangkut pautkan dengan gender suatu yang bisa membedakan antara laki-laki dan perempuan secara fisik dan sifat dan gender lebih mengarah pada sosial, budaya, agama, sosiologi dan biologi dilihat secara teoristik terdapat dua pengertian gender yaitu:

Menurut Nazarudin yaitu: Peran perempuan dan laki-laki memang tidak seimbang di masyarakat dan menjadi peran laki-laki yang di lihat begitu lengkap di masyarakat sedangkan peran dari perempuan tidak

selengkap peran laki-laki dan peran-peran itu menjadi masalah gender, dan menurut Murniati dan menurut Rusbeth Moss kanter 's yaitu: permasalahan gender atau perempuan dan laki-laki dalam masyarakat terjadi karena adanya kekurangan dari perempuan dalam melakukan peranannya baik di politik maupun di masyarakat sehingga laki-laki maju di depan untuk menjalankan peran tersebut.

Dalam pandangan sosial terdapat teori nature dan nurture pandangan sosial dan teori tersebut berarti perempuan menjadi terkucilkan di masyarakat tempatnya hidup dan perempuan mendapatkan tindakan yang tidak sesuai dengan laki-laki dalam perjuangan kemerdekaan di Indonesia perempuan melalui Gerakan individu membuat organisasi-organisasi perempuan dalam memperjuangkan Indonesia dari penjajah saat peristiwa 30 September 1965 organisasi perempuan menjadi dominan dalam memperjuangkan Indonesia merdeka dari penjajah tapi *political will* lah yang dianggap dominan dan mendapat dukungan dari pemerintah.

Menurut wawancara peneliti dengan DPRD Perempuan Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Jepara peran DPRD perempuan di kabupaten Jepara 30% kursi untuk perempuan. Saya masih memiliki keinginan seperti Swedia yang 45% jajaran legislatifnya adalah perempuan. Sudah banyak perempuan di Indonesia yang membanggakan di kancah perpolitikan, dan juga karena negara kita menganut demokrasi, maka memperjuangkan hak perempuan menurut saya sangat diperlukan.

Alhamdulillah DPRD perempuan selama ini saya rasa sudah menjalankan peran dengan semaksimal yang kami bisa. Menjadi keibu-ibuan, menjadi sosok yang rumat dan pembanding saat rapat selain itu saat tugas menyerap aspirasi misalnya, kami tidak mau kalah dengan laki-laki kami dengarkan aspirasi-aspirasi dari warga dapil kami sebisa dan sebanyak mungkin, dan juga menanggapi dengan sesuai porsi selain itu kami selalu berusaha hadir dalam

rapat untuk bisa benar-benar mendengar dan menganalisis kebijakan yang akan turun atau yang akan diperbaharui terlebih pada kebijakan tentang keterlibatan perempuan dalam panggung pemerintahan.

Peran Anggota DPRD Perempuan di kabupaten Jepara sebagai sosok ibu, Kita melunakkan ego laki-laki yang keras dengan kelembutan yang kita miliki kita juga bisa menjadi pemaarah untuk mereka yang kadang kekanak-kanakan dalam bekerja dan juga tak Lelah untuk mengingatkan satu sama lain jika ada yang kelewatan dalam pengambilan keputusan.

Rumat; barang-barang atau inventaris di gedung DPRD sudah menjadi kebiasaan bagi kami untuk mengingatkan agar barang selalu terawat dan rapi hal ini juga kita lakukan guna memberi contoh pada masyarakat, bahwa kita di fasilitasi gedung dan segalain ventaris itu harus kita jaga karena semua itu milik negara yang kita cintai.

Dalam rapat perundang-undangan, kita akan bicara paling keras jika ada kebijakan yang merugikan masyarakat apalagi perempuan mungkin karena emosi perempuan sangat kental, jadi kita sangat bersikekeh jika ada kejadian semacam itu.

Peran perempuan di dunia politik sangat menyedihkan dari kurangnya kuota pada saat belum adanya kewajiban setiap partai politik 30% untuk perempuan, kurangnya pengetahuan politik para perempuan, dan yang selalu melihat budaya yang kalo tidak menyesuaikan budaya, bertentangan dengan sosial masyarakat.

Mungkin sudah ada 6 DPRD perempuan di jepara tapi jumlah itu jauh dari 30% kuota perempuan di dunia politik, pengetahuan politik sangat di butuhkan di samping uang semua orang bisa menyalonkan menjadi DPRD tapi kebanyakan dari orang tua sehingga anaknya menjadi Anggota DPRD ataupun orang kaya yang menjadi DPRD karena uang, jarang sekali calon DPRD mempunyai pengetahuan yang memadai.